



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FEMMY WATI UMAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 274106

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 795.500.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 1840 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 95.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 872 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, LAINNYA Rp. 270.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, WARISAN Rp. 140.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 260.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, DATSUN GO + PANCA T 1.2 M/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 60.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.120.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.120.500.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.